



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

Nomor : 100.1.2.1/R/WFE/INSPE/2024/43 Bagansiapiapi, 25 Juni 2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
dan Kinerja pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hilir
di-
Bagansiapiapi

Dengan ini kami sampaikan hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk **Mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d)

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada Perangkat Daerah (PD) Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi AKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

No.	Rekomendasi LHE Inspektorat Tahun 2023	Rencana Aksi	Target	Waktu	Penanggung Jawab	Status/ Progres	Kondisi Terkini	Masalah yang dihadapi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;	- Membuat SOP pengukuran kinerja - Merevisi Peta Jabatan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen	Januari - Desember 2023	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang berjalan	- SOP pengukuran kinerja sudah dibuat. - Peta Jabatan sudah direvisi	Tidak ada kendala
2	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi;	- Membuat SOP pengukuran kinerja - Merevisi Peta Jabatan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen	Januari - Desember 2023	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang berjalan	- SOP pengukuran kinerja sudah dibuat. - Peta Jabatan sudah direvisi	Tidak ada kendala

3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja);	Membuat Laporan LKJIP dan mengupload ke e-SAKIP REVIU dan ke website OPD	2 Aplikasi	Januari - Maret 2023	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sudah terlaksana	Laporan LKJIP dapat di lihat dan diunduh melalui aplikasi e-SAKIP REVIU dan ke website OPD.	Website OPD rentan diserang hacker
4	Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Melakukan rapat internal untuk menelaah evaluasi kinerja yang telah tertuang dalam laporan LKJIP	1 Kegiatan	Januari - Desember 2023	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sudah terlaksana	Sudah dilakukan rapat internal untuk menelaah evaluasi kinerja yang telah tertuang dalam laporan LKJIP	diperlukan komitmen dari masing-masing penanggungjawab

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan bahwa nilai sebesar **75,60** dengan predikat **BB** (lihat lampiran kriteria di halaman terakhir). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2023	2024
A	Perencanaan Kinerja	30	24,30	24,00
B	Pengukuran Kinerja	30	21,96	23,10
C	Pelaporan Kinerja	15	10,80	10,50
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,13	18,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,19	75,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan pada meningkatnya komitmen pemimpin daerah bersama dengan para Kepala PD dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja. Namun terdapat dokumen yang belum dilengkapi yaitu :

- Terdapat Rumusan Tujuan /Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi hasil ataupun belum menjawab isu strategis dari perangkat daerah tersebut, Hal ini dapat terlihat dari Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman yang hanya mengangkat kinerja mengenai "Kepuasan Layanan Infrastruktur"

2) Pengukuran Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala oleh Perangkat Daerah.

3) Pelaporan Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir telah menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 sebagian besar telah disusun sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Akuntabilitas Kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Merumuskan Tujuan /Sasaran strategis yang berorientasi hasil dan dapat menjawab isu strategis dari Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi AKIP sebagai Penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,

H. ROY AZLAN, AP, M.Si
NIP. 19750413 199503 1 002

Tembusan Yth. :

Bupati Rokan Hilir (sebagai laporan).